



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 Juni 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 402/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 5 Juni 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan adik Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-179/Kua 31.03.3/PW.01/06/2018 tertanggal 4 Mei 2018 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksadkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 6 bulan.
4. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tidak bersedia menikahkan karena usia adik Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama Akbar bin Abd. Waris.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan adiknya yang bernama ANAK PEMOHON umur 14 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon, mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah adik Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya selama delapan bulan.
- Bahwa dia sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah.
- Bahwa keluarga calon suami pernah melamar dan sudah diterima dengan baik.
- Bahwa dia sudah menstruasi dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami adik Pemohon, mengaku bernama: **CALON SAUMI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon suami adik Pemohon yang bernama Akbar bin Abd. Waris.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia siap menikah dengan adik Pemohon.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah dan keluarganya serta keluarga calon istrinya telah merestui pernikahannya.
- Bahwa dia sudah sanggup menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai penghasilan.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B-179/Kua 31.03.3/PW.01/06/2018 tertanggal 4 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah adik Pemohon atas nama Rasdia, Nomor: DN-32 Dd/06 0021359 tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 027 Inpres Labuang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lia, Nomor 7604020711110008 tertanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai paman calon suami adik Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk adik perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena masih berumur 14 tahun.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami adik Pemohon bernama Akbar bin Abd. Waris.
- Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun adik Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status adik Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku kakak bermaksud untuk segera menikah karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi, calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai/menafkahi adik Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga calon suami adik Pemohon telah melamar adik Pemohon dan telah sepakat untuk menikah bahkan mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak adik Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

**2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu kandung calon suami adik Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk adik perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena masih berumur 14 tahun.

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami adik Pemohon bernama Akbar bin Abd. Waris.
- Bahwa setahu saksi antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun adik Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status adik Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku kakak bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi, calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai/menafkahi adik Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga calon suami adik Pemohon telah melamar adik Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak adik Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Abd. Waris, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan adik Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi yaitu Kunding bin Borahima dan Baharia binti Latif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan adik kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami adik Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena adik kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Rasdia, adalah siswi yang telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 027 Inpres Labuang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan yang dilahirkan di Labuang tanggal 2

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, sehingga usia adik Pemohon sampai sekarang adalah 13 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, adik Pemohon dan calon suaminya sudah baligh dan sepakat untuk menikah, calon suami adik Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta calon suami adik Pemohon telah melamar adik Pemohon, akan tetapi adik Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena adik Pemohon baru berumur 13 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun adik Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan adik Pemohon sudah pintar memasak dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga adik Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim adik Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

**إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي**

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض  
مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi adik laki dan usia baligh bagi adik perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur adik Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat dimana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini adik Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka adik Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan adik Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama Akbar bin Abd. Waris, cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Abd. Waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama Akbar bin Abd. Waris.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*., oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.**, dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.402/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 271.000,00**

*(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*